

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi diantaranya adalah kebutuhan untuk memenuhi rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Selain itu masyarakat juga dituntut serta dihadapkan dengan kebutuhan dan penghasilan kerja yang tidak menentu. Demi menanggulangi hal tersebut, maka masyarakat dituntut mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri untuk membantu di sektor perekonomian. Dengan menciptakannya sektor perekonomian seperti di era globalisasi yang bertujuan untuk menanggulangi sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian, maka dari itu dibutuhkannya peran serta kepedulian dari pemerintah dalam mencampuri dan mengurus masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian mengingat bahwa adanya peraturan pusat maka pemerintah perlu mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 yang mengatur tentang (UMKM) atau yang disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Pada pasal (3) yang bertujuan untuk merujuk dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun ekonomi nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang adil (Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 2008). Pada peraturan Daerah Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 6 tahun 2011 yang menyatakan bahwa UMKM sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Jawa Timur perlu adanya pemberdayaan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan usaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, serta potensi UMKM dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan

ekonomi di Jawa Timur, (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM).

UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan individu maupun kelompok yang peranannya sangat penting dan sangat dominan dalam kehidupan sehari – hari, untuk itu dalam perkembangan pendapatan ekonomi yang dinyatakan sebagai salah satu pelaku ekonomi perlu di berdayakan dari sebuah instansi-instansi sektoral terkait yang menaungi. Dewasa ini dalam pembinaan yang dilakukan oleh instansi telah melakukan berbagai hal kemampuan yang ada. Salah satu instansi terkait adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengkerahkan pada UMKM yang sangat kompetitif. Selanjutnya pembinaan yang dilakukannya oleh instansi melalui berbagai cara diantaranya adalah melalui pemberian pelatihan, sosialisasi, pemantauan secara terus menerus dengan tujuan supaya pengembangan ekonomi pada suatu wilayah / daerah semakin bertambah dan merata bagi para pelaku usaha. Dengan memberdayakan pelaku UMKM maka diharapkan mampu mendapatkan dan menciptakan kesejahteraan usaha, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas untuk mengelola sumber daya manusia yang awalnya tidak mempunyai kemampuan menjadi memiliki keahlian, sehingga pemberdayaan ini masyarakat mampu untuk hidup mandiri.

Dewasa ini untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat maka perlu adanya pemanfaatan dari sumber daya manusia yang optimal, dikarenakan sumber daya manusia adalah objek utama dari tumbuhnya ekonomi. Sebagaimana dimaksudkan dalam sebuah ekonomi perlu adanya dorongan manusia sebagai pendorong, agar perkembangan bisa bertambah meningkat. Berdasarkan adanya pelaku usaha UMKMd suatu daerah ini diharapkan masyarakat bisa menciptakan serta menumbuhkan inovasi pada dunia wirausaha, untuk itu masyarakat bisa ikut andil bagian dalam bersaing dengan pihak swasta demi kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produk olahan makanan, minuman dan lain-lain yang tentunya berbeda dengan yang lain. Oleh

sebab itu perlu adanya pembinaan dan pengembangan demi meningkatkan daya dukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dirasa semakin penting.

Sementara untuk meningkatkan daya dukung pada pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya ini, peneliti menggunakan model teori yakni permasalahan yang sangat krusial dan telah dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebenarnya para aktor pelaku usaha memiliki potensi yang sangat besar sekali, namun masih banyak hambatan bagi mereka dalam mengembangkan kapasitas dan akses sumberdaya produktif. Untuk mengetahui permasalahan apa saja, maka peneliti berasumsi, yakni : (1) “Akses Permodalan”. Permasalahan pertama kali yang selalu dihadapi oleh UMKM adalah hambatan modal, para pelaku usaha ketika ingin mendirikan UMKM selalu dibayang – bayangi dan terbelenggu saat mendirikan usaha yang ingin di ciptakan. Dikarenakan usaha yang dikehendaki ini sangat dominan dan mempengaruhi keadaan yang dimiliki oleh pelaku, maka dari itu semua unit usaha oleh pelaku usaha yang diciptakan ini mengakibatkan kemunduran dan pada akhirnya usaha yang dimiliki tidak bisa didirikan; (2) “Sarana dan prasarana”. Dalam sarana prasana yang di miliki oleh para pelaku usaha juga berpengaruh besar dan sangat berkaitan, dikarenakan sarana yang dimiliki oleh pelaku usaha sangat terbatas tergantung apa yang sedang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang dimilikinya dan bahkan tidak adanya sama sekali, terkadang hal ini disebabkan karena salah satu diantaranya adalah ketidak tahuan mereka (pelaku usaha) untuk menggunakan ketersediaan yang ada seperti halnya perijinan dagang usaha. Selain sarana juga adanya prasarana yang dijadikan sebagai lokasi tempat yang sangat berguna bagi usaha serta digunakan untuk menjual hasil produk yang dihasilkan. Ketika pelaku usaha sudah dimiliki juga pelaku usaha sangat bingung dimana akan mempromosikannya; (3) “Akses Pemasaran”. Pada akses pemasaran yang selalu dihadapi oleh para pelaku usaha yakni keterbatasan keluar masuknya barang pada dunia usaha. Kendati demikian produk yang dihasilkan dikarenakan semakin banyaknya kelompok

usaha dalam bersaing untuk memasarkan hasil produk - produk yang mereka peroleh oleh UMKM, sehingga pelaku usaha yang tidak cakap dalam memasarkan hasil produk akan merasa tertinggal dan bahkan kalah bersaing. Hal ini memungkinkan para pelaku usaha akan menyebabkan gulung tikar (bangkrut) dan membuktikan barang semakin menurun dalam pendapatan yang mereka peroleh; (4) “Sumber Daya Manusia”. Hambatan yang sering terjadi terhadap UMKM yakni pada keterbatasan sumber daya manusia, sebenarnya jika dibandingkan dengan jumlah UMKM. Maka pelaku usaha bisa menjalankan sesuatu hal untuk dijalankan, namun yang tidak memungkinkan adalah pengetahuan dalam mengelola serta menciptakan produk yang biasanya sangat terbatas. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha yang begitu banyaknya selalu mengikuti perkembangan zaman. Dewasa ini terkadang jika pengetahuan yang mereka peroleh tidak ada dorongan dari pihak luar maupun diri mereka sendiri dalam menciptakan inovasi baru, maka pendapatan yang mereka peroleh tidaklah meningkat. (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013)

Kota Surabaya merupakan salah satu Ibukota Provinsi yang berada di Jawa Timur dan merupakan kota metropolitan ke dua (2) setelah Jakarta, dengan pertumbuhan dan perkembangan wirausaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang begitu cepat, tentunya perkembangan usaha UMKM yang berada di Surabaya dari tahun ke tahun telah mengalami pertumbuhan / perkembangan yang cukup signifikan. Terbukti dengan adanya data ini, maka dapat disajikan pada tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya pada Tahun 2014 – 2017 dengan sebagai berikut :

Tahun	UMKM / Orang	Usaha Mikro dan Kecil
2014	27.926	25.353
2015	28.391	25.147

2016	28.759	26.037
2017	29.507	26.800

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

2017

Dari data tabel 1.1 dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surabaya yang menyebutkan bahwa UMKM kota Surabaya pada tahun 2017 telah mencapai angka 29.507 usaha. Dalam upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya peran serta dari pemerintah dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada, salah satunya yang ada di Surabaya yaitu Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang memiliki peran untuk membantu mengembangkan dalam potensi UMKM yang ada. Dengan ini menjadikan jembatan antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan kota Surabaya pada pemasaran produk, tujuannya tidak lain adalah agar bisa bersaing dengan produk negara lain dengan mengikuti pembinaan yang telah disiapkan oleh Dinas secara gratis (Amiruddin, 2018).

Mengetahui fenomena (Taqiyah, 2017) menyatakan bahwa : (1). “Adanya sebuah program dari pemberdayaan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya yakni melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan di kawasan tempat eks lokalisasi Dolly Surabaya. Pembinaan tersebut melibatkan Dinas Sosial kota Surabaya dengan bantuan pendampingan yang berasal dari beberapa organisasi masyarakat (ORMAS) yang telah ditunjuk secara langsung oleh Dinas Sosial kota Surabaya. Untuk itu perlu adanya proses dari pemberdayaan masyarakat yang terdampak pasca penutupan kawasan lokalisasi Surabaya, pemerintah telah memberikan beragam cara melalui pelatihan kepada masyarakat sekitar, seperti pembuatan makanan dan minuman, kerajinan tangan (batik dan sepatu), jahit pakaian, dan kewirausahaan”; (2). “Bentuk komitmen yang dilakukan oleh Dinas perdagangan kota Surabaya berupaya untuk meperdayakan para pelaku UKM agar semakin berkembang dengan adanya pembinaan melalui pelatihan –pelatihan yang telah

diwujudkan dengan adanya peraturan walikota Surabaya Nomor 10 tahun 2016 tentang RPJMD kota Surabaya tahun 2016-2021, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi yaitu Dinas perdagangan kota Surabaya perlu adanya pengoptimalkan produktivitas dan keterampilan pemilik UMKM”, (Anmiruddin, 2018 : 2).

Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat terhadap UMKM Jawa Timur yang ditujukan kepada UMKM Dolly Surabaya ini merupakan sebuah program yang telah dibuat untuk masyarakat *stakeholder* yang lemah, dengan berdasarkan pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan mengembangkan terhadap Usaha, Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkembang menjadi tangguh dan mandiri. Sejalan dengan perkembangan waktu ke waktu, maka diperlukan adanya program pemberdayaan dari dinas terkait. Mengenai UMKM Dolly yang berkenaan dengan perlu adanya sebuah penerapan ini bisa diartikan sebagai tindakan yang direncanakan secara terencana dan tersusun dengan cermat.

Mengingat adanya pemberdayaan masyarakat pada UMKM Dolly Surabaya maka dibutuhkan konsep pengembangan ekonomi lokal yang berdasarkan pada ekonomi di suatu wilayah itu, yang bisa bertujuan untuk mengurangi jumlah angka pengangguran demi melibatkan masyarakat dan meningkatkan dalam pekerjaan pada lapangan kerja serta menumbuhkan industri usahadalam memperbaiki kondisi dimana seperti aspek ekonomi dan sosial yang lebih meningkatkan dalam kesejahteraan ekonomi dan juga berfungsi untuk mempercepat tumbuhnya ekonomi pada daerah yang dirasa tertinggal.

Konsep ini bahwa peran yang dijalankan oleh pemerintah / sekelompok organisasi itu ikut terlibat dalam memberikan dorongan kepada aktivitas usaha yang telah dilakukan ke lapangan kerja. Dalam pengembangan ekonomi lokal

ini merupakan sebuah proses yang mengaitkan dengan perkembangan industri baru, serta pengembangan kapasitas pekerja yang menghasilkan produk guna lebih bermutu, menumbuhkan pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru.

Teori ini demi menumbuhkan suatu usaha yang mana dari UMKM mampu memperluas usaha yang lebih meningkat dengan keberadaan UMKM Dolly Surabaya, sebagai pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah Peraturan Gubernur melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Dinas Perdagangan dan Industri Kota Surabaya berwenang sebagai aktor pelaku dalam kepentingan berusaha menggali potensi usaha yang digeluti oleh para *stakeholder* yang berpotensi rentan akan sosial dan ekonomi di lingkungan kawasan Dolly Surabaya, dengan tujuan untuk mendorong dan mendukung demi kemandirian di sebagian atau seluruh aktor pelaku usaha UMKM Dolly Surabaya.

Pengembangan ekonomi lokal terhadap perberdayaan masyarakat UMKM Dolly ini sebagai dinas yang dicanangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011diperintahkan untuk menumbuhkan serta mendorong demi tercapainya suatu program pada pemberdayaan UMKM. Pengembangan ini di dasarkan untuk menekankan pada pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.Pada tingkat ini adalah tingkat yang paling mendasar dikarenakan tingkatan ini mengarahkan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di wilayah / daerah Dolly. Dengan adanya sumber daya lokal ini nantinya akan mampu memberikan dampak / manfaat baik pada masyarakat sekitar.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dalam pemberdayaan UMKM di Dolly Surabaya ?

2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong perkembangan ekonomi Dolly Surabaya ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis :

1. Seberapa jauh dari pelaksanaan dalam pemberdayaan UMKM Dolly Surabaya.
2. Apa sajakah upaya dalam mendorong perkembangan ekonomi Dolly Surabaya.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh peneliti, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi yang terkait di dalamnya, peneliti dapat menyumbangsih berupa pengarahan, pembinaan, pelatihan pada masyarakat yang terkena dampak terhadap ekonominya.
2. Bagi akademisi dapat memberikan sumbangsih kepada mahasiswa terhadap pengetahuan supaya mahasiswa bisa mengerti kepada dunia yang sebenarnya.

1.4 Sistematika Penelitian :

1. Bab I : Pendahuluan, peneliti akan menguraikan tentang latar belakang penelitian; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian.
2. Bab II : Kajian pustaka, peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu; landasan teori; kerangka dasar pemikiran.
3. Bab III : Metode Penelitian, peneliti akan menguraikan tentang jenis penelitian; lokasi penelitian; fokus peneliti; tipe dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik analisis data.
4. Bab IV : Peneliti akan menguraikan tentang deskripsi obyek; penyajian data; serta pembahasan.

5. Bab V : Penutup, yaitu peneliti akan menguraikan tentang hasil kesimpulan dan rekomendasi.